



TAJUK RENCANA

Reformasi Kelurahan di DIY

REFORMASI kelurahan menjadi fokus pembangunan DIY mendatang. Gubernur DIY Sri Sultan HB X, telah memberikan perhatian khusus untuk melakukan reformasi kelurahan, dalam pemaparan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027, Senin (8/8).

Dalam visi misi tersebut Gubernur DIY mengemukakan visi Pancamulia atau lima kemuliaan masyarakat Yogyakarta. Visi tersebut telah menjadi konsep utama dalam visi RPJMD 2017-2022. Menurut Sultan, Pancamulia sebagai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 memiliki keterkaitan substansi dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini pernah disampaikan dalam pidato pada 2 Agustus 2017.

Selain itu, ada yang menarik yang harus didorong adalah keinginan Gubernur untuk menjadikan DIY sebagai pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Program tersebut sebagaimana tercatat dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025 yang tinggal 3 tahun lagi dapat segera terwujud.

Dengan fokus pembangunan tersebut, mau tidak mau pemetaan kelurahan dan kelurahan di DIY harus segera dilaksanakan. Saat ini di DIY ada 438 kelurahan yang tersebar. Tertinggi ada di Gunungkidul 144 kelurahan, sedang di Kota Yogya terkecil ada 45 kelurahan. Dan pemetaan kembali, akan terlihat semua potensi, kelebihan dan kekurangan birokrasinya. Termasuk sejauh mana hubungannya kerja dengan perangkat desa yang lain, seperti BPD. Dengan demikian sudah tampak bahwa bakal ada pembenahan pada tataran birokrasi mereka.

Namun tentu tidak akan pukul rata, sebab problematika tiap kelurahan/kelurahan berbeda-beda. Tetapi tujuannya jelas agar dapat memberikan dampak kemajuan, baik dari sosial maupun ekonomi. Sehingga masyarakat semakin mandiri dan

memperoleh banyak manfaat melalui berbagai program di kelurahan. Nantinya mekanisme kerja, antara birokrasi dengan masyarakat dan organisasi stakeholder lebih efektif dan efisien, sehingga di kelurahan ada kemajuan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dengan konsep tersebut, masyarakat makin mandiri, maka dibentuk berbagai jenis desa ada desa budaya, desa mandiri pangan, desa wisata karena sesuai karakternya.

Karena itu, pembangunan untuk tingkat desa diselenggarakan dengan konsep Kementerian Desa PDTT. Karena mau tidak mau, akan selalu berkaitan antara kelurahan dan desa. Dalam hal inilah, maka konsep SDGs Global yang kemudian diturunkan ke level desa, menjadi SDGs Desa. Yang dimaksud dengan SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs adalah salah satu agenda internasional yang disusun PBB, dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia.

Dalam proses mencapai tujuan SDGs Desa ini kemudian ditinjau data desa yang bersifat mikro. Mengapa? Karena level desa itu lingkungannya kecil. Maka data yang ada pasti bersifat mikro. Ketika berbicara kemiskinan datanya mikro, maka orangnya ada, alamatnya di mana, kenapa miskin, masalah yang dihadapi apa sehingga jelas bagaimana cara mengatasinya.

Data mikro inilah yang akan menjadi kunci basis tahapan dalam mencapai SDGs desa. Misalnya soal kesehatan, penggunaan data mikro akan terjadi pemetaan yang jelas. Umpama penyakit yang banyak terjadi, penyebab dan kemudian penanggulangan. Demikian juga dalam pendidikan, akan lebih cepat memproses data untuk selanjutnya cepat-cepat ditanggulangi. Maka penanganan akan dilakukan lebih detail. Dengan demikian penanganan akan lebih baik, dan program DIY akan lebih lancar. (**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005